

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Belanja penyelenggaraan pemerintah desa memiliki data maksimum sebesar Rp 94.818.330 pada tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten TTS sedangkan data minimum sebesar Rp 18.091.758 pada tahun 2018 yang terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua dengan nilai rata-rata sebesar 17669,95. Belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa memiliki data maksimum sebesar Rp 242.570.059 pada tahun 2019 yang terdapat pada Kabupaten TTS sedangkan data minimum sebesar Rp 11.924.783 pada tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Manggarai Timur dengan rata-rata sebesar 18342,65. Belanja pembinaan kemasyarakatan memiliki data maksimum sebesar Rp 16.792.452 pada tahun 2018 yang terdapat pada Kabupaten Kupang sedangkan data minimum sebesar Rp 1.234.752 pada tahun 2020 yang terdapat pada Kabupaten Sabu Raijua dengan rata-rata sebesar 15443,76. Belanja pemberdayaan masyarakat Belanja pembinaan kemasyarakatan memiliki data maksimum sebesar Rp 81.545.082 pada tahun 2018 yang terdapat pada Kabupaten TTS sedangkan data minimum sebesar Rp 3.044.322 pada tahun 2018 yang terdapat pada Kabupaten Rote Ndao dengan rata-rata sebesar 16638,81.

2. Secara parsial belanja penyelenggaraan pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan, dan secara parsial belanja pembinaan kemasyarakata berpengaruh negatif dan signifikan.
3. Secara simultan belanja desa berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Hasil uji koefisien determinan (R^2), nilai adjusted R-Squared sebesar 0,075735, artinya sebesar 7,5% belanja desa berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, namun pemerintah perlu berinovasi dalam menaikan dana tersebut agar lebih efektif dalam pengetasan kemiskinan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Pemerintah ataupun instansi terkait kedepannya diperlukan kesiapan desa melalui SDM, selain itu pemerintah juga perlu melakukan pemantauan yang lebih terarah dan berkesinambungan kepada desa, dan perlu penguatan koordinasi dan konsolidasi serta sinergi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam pembangunan desa agar setiap dana yang sudah direalisasikan dapat dipergunakan dengan baik agar dapat menekan jumlah penduduk miskin.
2. Pemerintah perlu meperhatikan dana pelaksanaan pembangunan serta meningkatkannya agar bisa menekan jumlah penduduk miskin, dan juga pemerintah perlu menaikan dana pembinaan kemasyarakatan, karena

pembinaan kemasyarakatan sangat berpengaruh dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain yang mendukung dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks :

- Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rinka Cipta
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka
- Boediono, 1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE
- Ghozali, Imam (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, D.N (2013). *Dasar-dasar Ekonometrika*, Terjemahan Mangusing, R.C., Salemba Empa, Buku 2, Edisi, Jjakarta.
- Hardijono, R. (2013). *Kemandirian Ekonomi Desa melalui Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Harlik, Amri Amir dan Hardiani. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Indonesia. Universitas Brawijaya Malang.
- Jarnasy, 2004. *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika Jakarta
- Jhingan, M. L, 20010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo
- Jhingan, M. L. (1992). *Perencanaan, Ekonomi Pembangunan dan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Khusaini, M dan A. E. Y. (2006). *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah* (A. E. Yustika, Ed.). Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Jhingan, M. L. 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali Press
- Korten, D. C sjahrir, 2014. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Kuncoro, Mudrajad. 2013 *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Cetakan Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Lincolin Arsyad. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi.
- Mangkoesoebroto, 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta ; BPFE
- Martowardojo, A. D. (2014). *Satu Dewarsa Implementasi Otonomi Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta: 2-4 Oktober 2014 Kongres ISEI ke-XVIII
- Mudrajad Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan. Teori, masalah dan kebijakan*. Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta
- Sugiyono, 2008. *Statistik Untuk Peneliti*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Sukirno, Sadono, 2004. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sumpeno, 2011. *Perencanaan Desa terpadu*. Banda Aceh : Read
- Suparmoko, 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta, BPFE, UGM
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy
- Susanti, Herra, 2002. *Indikator-indikator Makro Ekonomi*. Jakarta : LPFE-UI
- Sukirno, Sadono, 2006. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta
- Suyanto, 2011. *Analisis Regresi untuk uji hipotesis*, Yogyakarta. Caps
- Todaro dan Smith, 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Sembilan . Jakarta : Erlangga

Artikel Jurnal :

- Aghina (2018). Pengaruh Dana Desa Dalam Pengetasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*. Vol 5 No.2, 2020. Hal 105-119

- Anisa Hasan, Chairullah Amin dan Mohammad Kotib (2022). Efektivitas Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Kecamatan Oa Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol XII. No.2. Hal 23-38*
- Moch Fajar Aris, Marseto dan Sishadiyati (2022). Analisis Ekonommi kebijakan Dana Desa Di Bidang Pemabangunan Desa Dan Bidag Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal*
- Andriyani, D. (2019). Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin di 36 Desa Kecamatan Juli Kabupaten Bireun. *Jurnal Ekonomi Universitas Almuslim Bireun. Aceh. Vol. XI No. 1 Maret 2019*
- Azwardi dan Sukanto (2014). "Efektifitas Dana Desa dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 12 No.1. Hal 29-41*
- Dewi, Wiwin Priana dan Mohamad wahed (2021). Analisis Pegaaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bojonegoro. *Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 3-ISSN: 2684—883X. Vol 3. No.4, April 2021*
- Intan Mala Sari (2017). " Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa Di Kabupaten Tulungagung". *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 15 No. 01, Juni 2017. Hal 34-49*
- Lalira (2018) "Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.18 no. 04, Tahun 2018. Hal 62-72*
- Muhamad F. Gumilang (2017) "Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Kabupaten Bogor". *Bogor agricultural University. 2017*
- Nilam Indah Susilowati (2017). "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol 1 No.4, Tahun 2017. Hal 514-526*
- Pasaribu (2019) "Dampak Spasial Dana Terhadap Pengetasan Kemiskinan Di Indonesia". *Seminar Nasional Geomatika. Vol 3, Februari 2019. Hal 415*

- Ratna Sari Dewi (2018) "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Utara". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 4 No. 2. 2018. Hal 11-18
- Sarah Nita Hasibuan (2019) " Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal IPB University*.
- Setiningsih (2018) "Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Melawi". *Jurnal Ekonomi Daerah*. Vol 5 No. 3. 2017. Hal 1-18
- Suliswanto, M.S.W (2010). "Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 8 No. 2. Hal 357-366
- Surianto Zamruddin dan Priyagus (2019). "Pengaruh Belanja Fisik dan Belanja Non Fisik Kampung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu". *Jurnal Universitas Mulawarman Samarinda*.
- Susilowati (2017) "Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Modal Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur". *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol 01 No.4, 2017.

Basis Data Tanpa Penulis :

- (BPS), B. P. (2018). *Statistik Indonesia Tahun 2018*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik. (www.bps.go.id)
- (BPS), B. p. (2018). *Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018*. Kupang : Badan Pusat Statistik. (www.bps.go.id)
- (BPS), B. P. (2019). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2019*. Provinsi Nusa Tenggara Timur : Badan pusat Statistik (www.bps.go.id)
- (BPS), B. P. (2021). "*Sosial Ekonomi*" (www.bps.go.id)
- (DJPK), D. J. (2017). *Buku Pintar Dana Desa* . Kementrian Keuangan Indonesia
 Agnia, L. (2018). *Pengaruh Dana Desa Dalam Pengetasan Kemiskinan di Indonesia*. (www.djpk.kemenkeu.go.id)
- BAPPENAS, 2020, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*. Sekretariat Kelompok Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan, Komite Penaggulangan Kemiskinan, Januari 2020

Dirjen Perimbangan Keuangan (2019). *Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2019*. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=9370>

Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 1957 "*Penyusunan APBD oleh DPRD*"

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 "*Sumber Pendapatan Desa*"

Peraturan Menteri No. 113 Tahun 2014 "*Pengelolaan Keuangan Desa*"

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2010 "*Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan*"

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 "*Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten/Kota*"

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2015 "*Pengelolaan keuangan Daerah*"

Permendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

_____ "*Pengelolaan Keuangan Daerah*"

Permendagri No.27 Tahun 2013 "*Dasar Pengelolaan Keuangan Daerah*"

Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017. *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 "*Alokasi Dana Desa*"

_____ "*Tentang Desa*"

_____ "*Menjadikan Desa Sebagai Bagian Paling Vital Dalam Pembangunan*"

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 "*Penyusunan APBD Melibatkan Pihak Eksekutif dan Yudikatif*"

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 “*Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah*”

“*Sumber-Sumber Pembiayaan Untuk
Pembangunan*”